

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Berdasarkan dari letak geografis, Asia Tenggara terletak diantara Benua Australia, daratan utama Benua Asia, kemudian Samudera Hindia, serta Samudera Pasifik.¹ Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang terletak di Asia Tenggara. Kedua negara ini juga saling berdekatan secara geografis. Dimana perbatasan di antara kedua negara ini berada di pulau Kalimantan, yang mencakup perbatasan darat. Sedangkan untuk perbatasan maritimnya berada di sepanjang Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan, dan Laut Sulawesi. Selain letak perbatasan, kedua negara ini juga memiliki lintas perbatasan. Lintas perbatasan terbanyak berada di antara pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia.

Asia Tenggara telah mengelompokkan negara-negaranya kedalam dua bagian, yaitu Asia Tenggara Daratan, dan Asia Tenggara Maritim.² Indonesia dan Malaysia termasuk didalam kelompok Asia Tenggara Maritim karena letak kedua negara tersebut berdekatan, dan juga dikelilingi dengan laut yang luas.

Dalam hubungan Indonesia dan Malaysia, Indonesia juga sering kali memposisikan dirinya sebagai saudara yang lebih tua dari Malaysia. Sedangkan Malaysia dianggap sebagai saudara yang lebih muda dari Indonesia.³ Hubungan yang dekat dari kedua negara ini dapat dilihat dalam banyak hal, salah satunya adalah kenyataan bahwa Indonesia dan Malaysia adalah negara yang bertetangga.

¹ Bambang Syaeful Hadi, M.Si. "Geografi Regional Indonesia" (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta) 11-19

² Kiki Rahmad, Mona Adria Wirda, Ali Nurman. "Kajian Geografis Perbatasan Laut antara Indonesia dan Malaysia" Jurnal geografi Vol.8, No.2, 2016. (Medan: Universitas negeri Medan) 178

³ Dion Maulana Prasetya. "Seladang meski tak serumpun Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif Geostrategis" Jurnal Insignia Vol.2, No.1, April 2015. 15

Seorang Menteri Malaysia, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, pada tanggal 8 November 1955 di Jakarta, mengatakan bahwa tidaklah dapat disangkal oleh dunia akan hubungan antar bangsa Melayu dengan bangsa Indonesia yang mana kita dikenal sebagai dua bangsa yang mendiami Gugusan Pulau-pulau Melayu. “Sungguhpun kita bercerai di satu babak tapi bersatu yang lain yaitu babak kebudayaan”.⁴

Selain menjadi negara serumpun, Indonesia dan Malaysia juga telah melakukan hubungan bilateral pada bidang pendidikan, ekonomi, dan juga pada bidang tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja Indonesia atau TKI menurut menteri Hukum dan HAM, mencapai 2,7 juta. Jumlah ini merupakan jumlah TKI terbesar di dunia.⁵ Indonesia juga banyak mengekspor beras dan jagungnya ke Malaysia, total dari ekspor yang dilakukan adalah 1 juta ton beras pertahun, dan 3,1 juta ton jagung pertahun. Nilai dari beras dan jagung ini mencapai Rp. 20 triliun, nilai ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.⁶

Presiden Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2014, beliau mulai menerapkan sebuah gagasan yang dikenal sebagai ‘Poros Maritim Dunia’ sebagai visinya untuk Indonesia. Visi ini dapat ditemukan di dalam buku visi dan misi dari Jokowi dan JK untuk mewujudkan politik luar negeri bebas aktif, memperkuat jati diri sebagai negara maritim, dan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

⁴ Ucapan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, tahun 1985.

⁵ Ade Putra, “Ada 2,7 juta TKI di Malaysia, Menkumham: Ini jumlah terbesar dari seluruh dunia” <https://news.okezone.com/read/2017/11/22/340/1818240/ada-2-7-juta-tki-di-malaysia-menkumham-ini-jumlah-terbesar-dari-seluruh-dunia> diakses pada 17 April 2018

⁶ Dwi Murdaningsih, “Ekspor beras ke Malaysia buktikan Indonesia surplus beras” <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/10/22/oy81np368-ekspor-beras-ke-malaysia-buktikan-indonesia-surplus-beras> diakses pada 17 April 2018

berbasisikan kepentingan nasional.⁷ Sejak adanya visi ini, Indonesia mulai semakin memperketat keamanan di wilayah lautnya. Indonesia juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru secara tegas untuk melindungi sumber daya laut dan daerah perbatasan teritorialnya.

Kondisi Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak laut, menjadikan Indonesia sering kali memiliki konflik di lautnya, salah satu contoh konflik yang sering kali dialami Indonesia di daerah lautnya adalah penangkapan ikan secara *illegal* yang dilakukan oleh para nelayan dari negara lain, salah satunya adalah nelayan dari negara Malaysia. Daerah yang sering kali dijadikan tempat para nelayan asing mengambil ikan Indonesia secara *illegal* adalah di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara atau Samudera Pasifik, Selat Makassar, dan Barat Sumatera atau Samudera Hindia.⁸

Kerugian yang dialami Indonesia karena adanya nelayan asing yang mencuri ikannya adalah berkurangnya hasil dari sumber daya lautnya. Kerugian ini mencapai USD 25 Miliar setiap tahun. Di wilayah Sibolga saja, total kerugian ikan yang dialami Indonesia adalah sebanyak 200 ton per hari.⁹

Nelayan pribumi juga ikut mendapat dampak dari kasus pencurian ikan oleh nelayan asing, dimana nelayan pribumi tidak dapat menikmati potensi laut Indonesia secara maksimal karena harus bersaing dengan nelayan asing.¹⁰ Dilihat di Natuna saja, hasil tangkapan dari para nelayan pribumi selalu berkurang dari

⁷ Dion Maulana Prasetya. “Seladang meski tak serumpun Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif Geostrategis” Jurnal Insignia Vol.2, No.1, April 2015. 22

⁸ Arfianto, Arief. “Illegal fishing kejahatan transnasional yang dilupakan” <https://news.detik.com/opini/d-1218292/illegal-fishing-kejahatan-transnasional-yang-dilupakan-detik.com> diakses pada 15 Februari 2018

⁹ Maritimo, “Agar para pencuri ikan itu kapok” <https://maritim.go.id/agar-para-pencuri-ikan-itu-kapok/> diakses pada 10 Maret 2018

¹⁰ Indomarine Institute, “Nelayan di Perbatasan terlindas nelayan asing” <http://indomaritimeinstitute.org/?p=1947> diakses pada 05 Februari 2018

waktu ke waktu. Total kerugian yang diakibatkan oleh *illegal fishing* pada wilayah ini mencapai Rp.18 triliun disetiap tahunnya.¹¹

Adapun cara lain dari pencurian ikan milik Indonesia adalah penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan menggunakan izin palsu, menangkap ikan dengan alat tangkap yang sebenarnya dilarang, serta menangkap jenis-jenis ikan yang sebenarnya tidak diizinkan untuk ditangkap.¹²

Maraknya pencurian ikan di Indonesia menyebabkan terjadinya ancaman pada kelestarian sumber daya laut Indonesia, kemudian para nelayan pribumi juga merasakan susahnyanya mendapatkan ikan di laut Indonesia sendiri mengingat kapal dan perlengkapan untuk menangkap ikan milik nelayan pribumi masih menggunakan armada yang sederhana, jika dibandingkan dengan kapal dan alat-alat modern yang dimiliki oleh nelayan asing, termasuk milik Malaysia.¹³

Kembali kepada visi dari Presiden Indonesia mengenai Poros Maritim Dunia atau PMD, Indonesia mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tegas untuk melindungi laut dan sumber daya lautnya, yang dilakukan Indonesia adalah melakukan Penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/50/MEN/12 mengenai rencana dari aksi nasional dalam pencegahan dan penanggulangan *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU Fishing). Penanggulangan IUU *fishing* ini sendiri dilakukan dengan cara mengikuti peraturan internasional, dan mulai melakukan penyesuaian legislasi nasional, kemudian menyediakan infrastruktur untuk melakukan pengawasan, seperti kapal

¹¹ Rosyita, "Nelayan Natuna di kota tengah malam"
<https://regional.kompas.com/read/13361736/Nelayan.Natuna.di.Kota.Tengah.Malam>. diakses 04 April 2018

¹² Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi. "Upaya Indonesia dalam menangani *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia" (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2014) 5

¹³ *Ibid*

yang bertugas untuk mengawas, melakukan patroli di daerah perbatasan, dan juga membentuk peradilan perikanan.¹⁴

Kebijakan yang dipilih berlandaskan dari kepentingan nasional, atau masalah domestik dari Indonesia. Kita mengetahui bahwa di Asia Tenggara, negara berhak memilih pilihan keamanan untuk negaranya sendiri.¹⁵ Sehingga untuk masalah ini yang bersifat sebagai penegak hukum nasional, Indonesia berharap negara lain tidak ikut campur di dalam urusan dalam negerinya.

Kemudian lahir lah sebuah kebijakan penenggelaman kapal yang berlandaskan dari undang-undang milik Indonesia no. 45 tahun 2009, pasal 69. Kebijakan ini pertama kali dicetuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dimana kebijakan ini dilakukan sejak tahun akhir tahun 2014, atau sejak terpilihnya Presiden Joko Widodo hingga sekarang. Tercatat sejak tahun akhir tahun 2014, Indonesia telah menenggelamkan 317 unit kapal pencuri ikan di laut Indonesia. Selama tahun 2016, terdapat 115 kapal asing yang telah ditenggelamkan, dan 27 kapal diantaranya adalah milik Malaysia.¹⁶ Namun jumlah ini sedikit turun jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2015 dengan angka 117 kapal yang telah di tenggelamkan. Ini berarti bahwa kebijakan penenggelaman kapal ini berhasil memberikan efek jera kepada nelayan-nelayan asing yang melakukan pencurian ikan di Indonesia.¹⁷

Setelah dilakukannya penenggelaman kapal di laut Indonesia, muncul ketegangan yang berasal dari publik Malaysia. Ketegangan ini bermula dari

¹⁴ Almuzzamil, T. Muhammad. "Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi illegal fishing pada tahun 2014-2015" Jom Fisip Vol.4 No.2, 2017. (Pekanbaru: Universitas Riau) 9-10

¹⁵ Kwa Chong Guan, and John K. Skogan, "Maritime security in Southeast Asia" (New York: 2007) 3-13.

¹⁶ Katadata, "Susi Pudjiastuti tenggelamkan 115 kapal selama 2016" <https://katadata.co.id/berita/2017/01/06/susi-pudjiastuti-tenggelamkan-115-kapal-selama-2016> diakses pada 25 Februari 2018

¹⁷ Ibid

publik Malaysia yang mulai menyampaikan tanggapannya mengenai penenggelaman kapal ini melalui media-media Malaysia. Publik Malaysia mulai memprotes aksi Indonesia dalam menenggelamkan kapal milik Malaysia. Kementerian Luar Negeri Malaysia, juga menyatakan bahwa penangkapan ini tidak konsisten dengan pemahaman yang dicapai antara Malaysia dan Republik Indonesia dalam menanggapi insiden terkait perikanan ini.¹⁸

Selain publik Malaysia mulai menyampaikan amarahnya kepada pemerintah Indonesia, mereka juga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo angkuh, karena menggunakan pendekatan konfrontasi. Mereka mengatakan hal ini melalui media massa Malaysia.¹⁹ Kebijakan ini juga dianggap Malaysia akan memperburuk hubungan antara kedua negara ini. Kemudian hal ini langsung di respon oleh Djarot Saiful, seorang anggota komisi II DPR, dimana ia mengatakan bahwa kebijakan ini bukanlah bentuk keangkuhan, melainkan bentuk ketegasan dari seorang pemimpin negara.²⁰

Kebijakan penenggelaman kapal dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo ini juga dianggap kurang peduli dengan diplomasi regional. Malaysia juga mulai membandingkan kebijakan ini dengan kebijakan terdahulu dari Presiden Indonesia sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono yang selalu menegaskan tentang *'Thousand friends, zero enemy'*.²¹ Kemudian mereka menyayangkan perjuangan Susilo Bambang Yudhoyono dalam menjaga

¹⁸Gita Amanda. "Nelayannya ditahan, Malaysia marah ke pemerintah Indonesia" <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/16/04/19/o5vk0i377-nelayannya-ditahan-malaysia-marah-ke-pemerintah-indonesia> diakses pada 22 Februari 2018.

¹⁹ Ku Seman Ku Hussain. "Maaf cakap, inilah Jokowi" <http://www.utusan.com.my/rencana/maaf-cakap-inilah-jokowi-1.28094> diakses pada 25 Januari 2018.

²⁰Merdeka, "Djarot: Jangan sampai kita ditekan oleh Malaysia" <https://www.merdeka.com/peristiwa/djarot-jangan-sampai-kita-ditekan-oleh-malaysia.html> diakses pada 25 Februari 2018.

²¹ B. A. Hamzah, "Sinking the Ships: Indonesia's Foreign Policy under Jokowi" (Singapore: RSIS Commentary, 2015) 1.

hubungan baik dengan negara tetangga kini harus berakhir setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya, media massa Malaysia juga menyelipkan kata-kata “Maaf cakap, inilah Jokowi”²² sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap kebijakan penenggelaman kapal yang disetujui oleh Presiden Indonesia tersebut. Malaysia juga meminta publik untuk kembali mencermati ‘bangsa serumpun’ yang selama ini disandang oleh Indonesia dan Malaysia.²³ Jokowi juga dinilai publik Malaysia memilih pendekatan konfrontasi dalam menanggulangi masalah pencurian ikan dan keamanan teritorial perbatasannya dengan Malaysia.

Namun karena publik Malaysia yang sedari awal menolak dan menyayangkan kebijakan ini, mereka mulai mengaitkan kebijakan ini dengan isu para tenaga kerja Indonesia yang masuk ke Malaysia dengan cara *illegal*.²⁴ Mereka terus membandingkan masalah penerobosan laut Indonesia dengan penerobosan para TKI *illegal* yang berasal dari Indonesia ke wilayah Malaysia.²⁵

Media Malaysia juga mengatakan, dalam menangani kasus TKI *illegal*, Malaysia menggunakan cara yang bersifat kemanusiaan dan tidak diluar batas seperti yang dilakukan Indonesia, yaitu menenggelamkan kapal Malaysia dengan cara diledakkan di laut Indonesia. Padahal publik Malaysia mengatakan bahwa TKI *illegal* juga memiliki dampak untuk negara Malaysia sendiri, yaitu masalah keamanan dan juga sosial.²⁶

²² Viva, ‘Media Malaysia: Maaf cakap, inilah jokowi’ <https://www.viva.co.id/berita/dunia/563046-media-malaysia-sebut-jokowi-angkuh> diakses pada 22 Januari 2018.

²³ *Ibid*

²⁴ Ku Seman Ku Hussain. “Maaf cakap, inilah Jokowi” <http://www.utusan.com.my/rencana/maaf-cakap-inilah-jokowi-1.28094> diakses pada 25 Januari 2018.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Ni Kumara Santi Dewi, “Media Malaysia sebut Jokowi Angkuh” <https://www.viva.co.id/berita/dunia/563046-media-malaysia-sebut-jokowi-angkuh> diakses pada 22 Februari 2018.

Publik Malaysia mulai meminta Presiden Jokowi untuk kembali membaca ulang nota kesepahaman yang telah disepahami oleh kedua negara ini pada tahun 2011 lalu.²⁷ Mereka mengatakan bahwa penenggelaman kapal dengan cara pengeboman tidak tercantum di dalam MOU tersebut.

Menanggapi pernyataan publik Malaysia tersebut, seorang pengamat Hubungan Internasional, Nur Hasan mengatakan bahwa Malaysia memang tidak patut untuk memperlakukan TKI *illegal* dengan cara tidak ber-prikemanusiaan, atau dengan hal yang buruk, karena subjek dari hukum pencurian ikan dan TKI *illegal* adalah dua hal yang berbeda.²⁸ Menurutnya, setiap negara memang harus menegakkan hukum yang dimiliki oleh masing-masing negara.²⁹ Sehingga tidak mungkin untuk Malaysia harus memberikan hukuman seperti penyiksaan TKI *illegal* hanya karena kebijakan penenggelaman kapal dengan cara dibom yang telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo itu.

Dari penjabaran diatas, dapat dilihat dampak dari kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan Indonesia, dengan respon yang diberikan Malaysia pasca penenggelaman kapal, dapat disimpulkan bahwa hubungan Indonesia dan publik Malaysia mulai mengalami ketegangan.³⁰ Dimana kecaman kepada mentreri Susi dan Presiden Joko Widodo mulai di layangkan oleh publik Malaysia melalui media massa.³¹

²⁷ Dewi, Ni Kumara Santi “*Media Malaysia sebut Jokowi Angkuh*” <https://www.viva.co.id/berita/dunia/563046-media-malaysia-sebut-jokowi-angkuh> diakses pada 22 Februari 2018.

²⁸ Lenny Sulistyawati. “*Soal penenggelaman kapal, Malaysia takkan perlakukan buruk TKI*” <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/20/internasional/global/14/11/27/infpc6m-soal-penenggelaman-kapal-malaysia-takkan-perlakuan-buruk-tki> diakses pada 15 Februari 2018

²⁹ *Ibid*

³⁰ Ku Seman Ku Hussain. “*Maaf cakap, inilah Jokowi*” <http://www.utusan.com.my/rencana/maaf-cakap-inilah-jokowi-1.28094> diakses pada 25 Januari 2018.

³¹ *Ibid*

Menanggapi ketegangan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia mulai mencari cara agar citranya membaik dimata publik Malaysia yang kini telah menganggap buruk citra Indonesia. Indonesia mulai melakukan upaya-upaya diplomasi publik yang bertujuan untuk memperbaiki citranya di Malaysia.³²

Sebelum adanya ketegangan antara Indonesia dan Malaysia pasca penenggelaman kapal, diplomasi yang dilakukan Indonesia ke Malaysia tetap bersifat reaktif, yaitu sikap dalam bertindak dengan cara spontan dan tidak berdasarkan kepada nilai-nilai yang dianut dan membiarkan dikendalikan oleh lingkungan sosial, bukan diri sendiri.³³ Diplomasi publik yang berkarakter reaktif ini juga akan hilang setelah mendapatkan respon, sehingga karakter ini tidak bersifat permanen ataupun berkelanjutan.

Banyak cara lain yang juga dilakukan untuk melancarkan upaya diplomasi publik Indonesia terhadap Malaysia agar citra Indonesia kembali membaik pada masa sebelum adanya penenggelaman kapal. Beberapa contoh upaya lainnya adalah seperti adanya kelompok budaya yang melakukan pertemuan untuk berbagi informasi dan ide tentang hal tertentu, kemudian membuat pertunjukan seni budaya.³⁴ Kedekatan yang dilakukan secara terus menerus ini di harapkan akan menimbulkan kedekatan emosi dan memunculkan kesepahaman. Selain kelompok budaya, upaya lainnya yang dilakukan Indonesia adalah pada bidang pendidikan. Dimana Indonesia memberikan beasiswa-beasiswanya melalui

³² Ghani Rohani Hj. Ab & Zuhilmi Paidi “*Malaysia-Indonesia: Pengalaman Hubungan Dua Negara Serumpun*” Political Managements and Policies Malaysia. 224-227.

³³ Iva Rachmawati, ‘*Karakter Diplomasi Publik Indonesia terhadap Malaysia*’ Vol. 6, No.1 April-September 2017. 3

³⁴ *Ibid*

international education exchange.³⁵ Diharapkan upaya ini mampu menjadikan generasi muda dari negara yang menerima beasiswa, untuk dapat melihat langsung sistem politik, budaya, dan nilai dari negara pemberi beasiswa. Dimana sebelumnya mereka hanya mendengarkan segala sesuatu hanya dari media massa, tanpa melihat langsung kedalam sistem Indonesia.

Perlunya memperbaiki citra Indonesia kepada publik Malaysia pasca adanya kebijakan penenggelaman kapal juga memiliki alasan tersendiri. Mengingat Indonesia dan Malaysia bertetangga, dan juga merupakan negara serumpun. Dimana Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan tradisi yang didasarkan kepada nilai-nilai seperti kesamaan rumpun bangsa yang sama, kemudian dilanjutkan dengan kesamaan budaya, dan juga agama. Sehingga perlu bagi keduanya untuk tetap memiliki hubungan yang baik.³⁶

Dipilihnya diplomasi publik sebagai salah satu cara pendekatan Indonesia kepada publik Malaysia adalah karena konflik berawal dari protes yang dikemukakan oleh publik Malaysia melalui media Malaysia, yang merupakan perwakilan dari opini masyarakat di negara tersebut.³⁷ Diplomasi publik merupakan sebuah instrumen untuk mengubah opini dari negara lain.³⁸ Indonesia juga telah melakukan diplomasi publik paska adanya kebijakan penenggelaman kapal.³⁹ Maka diharapkan setelah melakukan diplomasi publik kepada Malaysia, opini masyarakat Malaysia dapat berubah kepada Indonesia.⁴⁰

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

³⁷ Lisbet, "Diplomasi Indonesia terhadap kasus penenggelaman kapal nelayan asing" Vol. VI, No.24, 2014. 6

³⁸ *Ibid*

³⁹ Selfie Miftahul Jannah, "Susi Blak-blakan dampak maling ikan ke sektor perikanan RI" <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3811975/susi-blak-blakan-dampak-maling-ikan-ke-sektor-perikanan-ri> diakses pada 19 Februari 2018.

⁴⁰ *Ibid*

Presiden Joko Widodo juga mengatakan dalam sebuah pidatonya, untuk memperbaiki citra Indonesia dimata publik dari negara lain, perlu dilakukan diplomasi publik dalam bentuk *branding country*, expo budaya, dan mempromosikan kuliner Indonesia.⁴¹ Pernyataan yang serupa juga sudah pernah sebelumnya dinyatakan oleh mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.⁴² Dalam sebuah pidatonya beliau mengatakan dalam membangun kembali citra di Malaysia, perlu menggunakan diplomasi publik, mengingat Indonesia seringkali terlibat masalah dengan publik Malaysia seperti masalah-masalah yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.⁴³

Selain upaya-upaya yang disebutkan pada bagian sebelumnya, juga ada upaya diplomasi publik lainnya, yaitu *country as brand*, dimana upaya ini juga dilakukan Indonesia untuk membangun kembali citra Indonesia atau *re-branding*.⁴⁴ Contoh dari *country as brand* Indonesia adalah *Wonderful Indonesia* dan *Remarkable Indonesia*.⁴⁵ Kedua *brand* ini akan berpengaruh dengan reputasi Indonesia, dan memberikan dampak untuk hubungan ekonomi dan politik Indonesia dan Malaysia, serta juga menjangkau publik Malaysia.

Diplomasi publik dikenal sebagai upaya dalam menjaga kesepahaman dan juga relasi keberadaan diri dalam pergaulan antar negara. Diplomasi publik ini

⁴¹ Kemlu RI, “Presiden Jokowi segera ambil langkah konkret perkuat Citra Indonesia” <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Presiden-Jokowi-Segera-Ambil-Langkah-Konkret-Perkuat-Citra-Indonesia.aspx> diakses pada 21 Februari 2018.

⁴² Yudha Wirakusuma K, “Konflik RI-Malaysia Media pencitraan SBY di LN” <https://news.okezone.com/read/2010/09/08/337/371428/konflik-ri-malaysia-media-pencitraan-sby-di-ln> diakses pada 22 Februari 2018.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Kishan S. Rana “21st century ambassador: Plenipotentiary to chief executive” (UK: Oxford University Press, 2005) 78

⁴⁵ Fabian Januaris Kuwado, “Indonesia akan punya nation branding” <https://nasional.kompas.com/read/2016/09/27/19514661/indonesia.akan.punya.nation.branding> diakses pada 12 Maret 2018.

juga diperlukan sebagai upaya komunikatif dalam memperbaiki konflik antar negara, seperti yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia pasca adanya kebijakan penenggelaman kapal di laut Indonesia.⁴⁶

Presiden Joko Widodo mengatakan, dalam membangun kembali citra Indonesia diperlukan tindakan *soft power*, atau diplomasi, dengan tujuan diterima oleh masyarakat publik negara tujuan dan juga pemerintahnya.⁴⁷ Didalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana upaya diplomasi publik yang dilakukan Indonesia kepada Malaysia pasca adanya kebijakan penenggelaman kapal yang lahir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki citra Indonesia.



⁴⁶ Iva Rachmawati, "Karakter Diplomasi Publik Indonesia terhadap Malaysia" Vol. 6, No.1 April-September 2017. (Yogyakarta: UPN Veteran) 1-2.

⁴⁷ Presidenggo, "Membangun harga diri bangsa, memperbaiki citra bangsa" <http://www.presidentri.go.id/berita-aktual/membangun-harga-diri-bangsa-memperbaiki-citra-bangsa.html> diakses pada 10 Maret 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Presiden Joko Widodo menerapkan gagasan Indonesia sebagai ‘Poros Maritim Dunia’ atau PMD. Setelah itu lahir kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di laut Indonesia. Kapal Malaysia telah ditenggelamkan di laut Indonesia dengan jumlah yang cukup banyak. Publik Malaysia menanggapi kebijakan ini dengan menuliskan artikel-artikel di media massa tentang amarah dan kekecewaan mereka mengenai kebijakan ini.

Menanggapi ketegangan yang terjadi diantara kedua negara ini, Indonesia mulai melakukan diplomasi publik untuk memperbaiki citranya kembali dari kalangan publik Malaysia. Upaya ini perlu dilakukan karena mengingat Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang serumpun dan berdekatan secara geografis.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari yang telah dituliskan dalam latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis berupaya untuk menjawab pertanyaan **Bagaimana diplomasi publik Indonesia dalam memperbaiki kembali citra Indonesia di Malaysia paska kebijakan penenggelaman kapal Malaysia yang melakukan *illegal fishing* di laut Indonesia.**

1.4 Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, penulis memiliki tujuan penelitian, yaitu untuk dapat mengetahui upaya diplomasi publik yang dilakukan Indonesia kepada Malaysia untuk memperbaiki citra Indonesia

pasca penenggelaman kapal Malaysia di laut Indonesia sejak akhir tahun 2014, atau setelah terpilihnya Presiden Joko Widodo.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini di harapkan nantinya akan menjawab pertanyaan mengenai upaya diplomasi publik apa saja yang dilakukan oleh Indonesia paska memburuknya citra Indonesia di kalangan publik Malaysia karena kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan *illegal fishing* di laut Indonesia.

Kemudian di harapkan akan memberikan gambaran dari proses diplomasi publik Indonesia kepada publik Malaysia dan pengaruhnya terhadap citra Indonesia di Malaysia. Diplomasi publik juga dikenal sebagai upaya menggunakan *soft power*, dan di penelitian ini akan di jelaskan apakah upaya dengan cara *soft power* lebih berhasil atau lebih memberikan efek kepada Malaysia daripada dengan cara yang bersifat *hard power*.

1.6 Tinjauan Pustaka

Berikut adalah beberapa jurnal, artikel, ataupun website resmi yang telah penulis pilih sebagai bahan *literature review* dari penelitian ini. Pertama, penulis memilh tulisan “*Seladang meski tak Serumpun Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif Geostrategis*”⁴⁸ di tulis oleh Dion Maulana Prasetya di sebuah jurnal. Disini dijelaskan mengenai kondisi dari perspektif geostrategis Indonesia dan juga Malaysia. Kemudian dijelaskan mengenai visi baru dari Presiden Joko

⁴⁸ Dion Maulana Prasetya. “*Seladang meski tak serumpun Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif Geostrategis*” Jurnal Insignia Vol.2, No.1, April 2015

Widodo tentang Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia atau PMD. Semenjak di umumkan visi ini, Indonesia terus berupaya untuk semakin memperketat dan menjaga daerah lautnya dan juga sumber daya lautnya.

Kemudian, jurnal kedua yang dibaca adalah “*Upaya negara Indonesia dalam masalah Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*”⁴⁹ yang ditulis oleh Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi. Pada jurnal ini dijelaskan mengenai masalah yang di hadapi Indonesia karena Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki wilayah laut yang banyak dan terluas. Sehingga masalah yang juga di hadapi disini juga banyak berasal dari wilayah lautnya. Seperti salah satunya adalah *illegal fishing*. Maraknya para nelayan asing yang datang ke laut Indonesia untuk melakukan kejahatan ini berdatangan dari negara-negara tetangga, termasuk Malaysia yang menjadi tetangga Indonesia yang dekat. Daerah yang sering kali di jadikan tempat para nelayan asing mengambil ikan Indonesia secara *illegal* adalah di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara atau Samudera Pasifik, Selat Makassar, dan Barat Sumatera atau Samudera Hindia.

Kajian pustaka yang ke tiga adalah “*Maritime Security in Southeast Asia*”⁵⁰ yang ditulis oleh Kwa Chong Guan, dan John K. Skogan. Dimana mereka membahas mengenai pilihan yang ada untuk keamanan di Asia tenggara. Seperti pada umumnya keamanan dianggap sebagai urusan domestik. Atau bisa juga menjadi hubungan bilateral, dan bahkan multilateral. Kemudian, masalah keamanan juga sering kali dikarenakan oleh kekuatan besar yang melanggar kedaulatan negara pesisir terutama yang berkaitan dengan SLOC (*Sea lines of*

⁴⁹ Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi. “*Upaya Indonesia dalam menangani Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*” (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2014)

⁵⁰ Kwa Chong Guan, and John K. Skogan, “*Maritime security in Southeast Asia*” (New York: 2007) 3-13.

communication). Dengan begitu, beberapa negara di Asia Tenggara meminta bahwa tidak ada kerjasama keamanan yang harus membatasi kedaulatan nasional sebagai prinsip mutlak. Sama seperti prinsip selanjutnya yaitu melarang campur tangan luar dalam urusan dalam negeri. Meskipun prinsip ini terdengar sedikit asing, dan tidak masuk akal, namun banyak negara yang baru merdeka meminatinya, khususnya negara di kawasan Asia Tenggara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia memilih kebijakan penenggelaman kapal ini karena masalah yang Indonesia hadapi adalah masalah domestik yang tidak perlu campur tangan negara lain ataupun pihak lain.

Jurnal yang ke-empat, berjudul "*Karakter Diplomasi Publik Indonesia terhadap Malaysia*"⁵¹ yang ditulis oleh Iva Rachmawati. Disini dijelaskan mengenai karakter-karakter yang ada di dalam sebuah diplomasi publik. Seperti karakter reaktif, yang berarti bersikap dalam bertindak dengan cara yang spontan dan tidak berdasarkan kepada nilai-nilai yang di anut dan membiarkan diri dikendalikan oleh lingkungan sosial, bukan diri sendiri. Kemudian karakter inferior, karakter ini sendiri berarti ketika sedang merasa tidak memiliki kemampuan yang cukup kemudian karena itu menjadi merasa seperti sedang di rendahkan atau tidak dianggap oleh pihak lain. Dampak dari karakter ini adalah tindakan yang negatif dan cenderung agresif. Namun tidak semua diplomasi publik yang dilakukan menggunakan karakter seperti ini.

Dari beberapa jurnal yang penulis lihat dan baca tersebut, semua jurnal tersebut memiliki keterkaitan dengan isu yang akan penulis teliti. Dimana kesamaan yang penulis temukan adalah penulis juga akan meneliti mengenai

⁵¹ Iva Rachmawati. "*Karakter Diplomasi Publik Indonesia terhadap Malaysia*" Vol. 6, No.1 April-September 2017. (Yogyakarta: UPN Veteran)

upaya diplomasi publik Indonesia untuk memperbaiki citranya di mata publik Malaysia paska kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan Indonesia. Dimana kebijakan ini dipilih Indonesia karena Indonesia memiliki pilihan dari keamanan sendiri, yaitu kebijakan keamanan nasional atau domestik.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Diplomasi Publik

Diplomasi publik adalah kegiatan dari pemerintah yang bekerjasama dengan lembaga non pemerintah untuk menjangkau publik dari negara lainnya. Biasanya diplomasi publik ini dilakukan untuk memperbaiki citra negara dengan cara mempromosikan budaya, melakukan kerjasama pada bidang akademik dengan cara melakukan pertukaran pelajar, dan bentuk-bentuk lainnya.⁵²

Upaya diplomasi publik ini juga memiliki tujuan dalam mempengaruhi opini publik atau aktor di sebuah negara dengan tujuan untuk memperbaiki citra atau mengubah kebijakan luar negeri dari negara yang menjadi targetnya.⁵³ Menurut Shaun Riordan, didalam buku Kishan S. Rana, semua jenis diplomasi adalah diplomasi publik. Namun banyak yang mengatakan jika demikian maka itu terlalu luas cakupannya. Namun memungkinkan untuk memahami diplomasi publik dengan cara seperti ini, namun dengan cara memisahkan setiap komponennya seperti diplomasi budaya, pendidikan, ataupun diplomasi dengan media.⁵⁴

⁵² Kishan S. Rana “21st century ambassador: Plenipotentiary to chief executive” (UK: Oxford University Press, 2005) 77-78.

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

Pada dasarnya ketika sebuah negara melakukan diplomasi publik kepada sebuah negara tujuan, dimana sebelumnya masyarakat dari negara itu memberikan opininya tentang negara lain, itu berarti opini publik berarti sangat mempengaruhi pemerintah.⁵⁵

Menurut buku yang ditulis Kishan S Ranna, diplomasi publik dalam bentuk pendidikan adalah yang paling penting karena hal ini bersifat jangka panjang. Karena mengubah citra sebuah negara diperlukan diplomasi publik jangka panjang.

Kishan S Rana juga membagi tiga komponen dari diplomasi publik, yaitu:

1. Pengelolaan Berita (*News Management*)

News management ini telah dilakukan sejak lama, sama seperti berpolitik.

News management ini juga berarti mempengaruhi publik melalui media.

Adanya jaringan informasi global yang dapat menjadikan transmisi berita ke khalayak dunia menjadi lebih cepat.

Di dalam *news management*, terdapat beberapa komponen lainnya, yaitu:

- Berita atau informasi yang di sajikan tidak hanya di tujukan untuk satu orang saja, melainkan untuk khalayak banyak.
- Jurnalisme investigatif, dimana media harus waspada dan mulai mencermati pernyataan yang ada.
- Biasanya *news management* berasal dari kepala pemerintah.⁵⁶
- Diaspora juga berperan dalam memberikan informasi mengenai negara asal.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Based on personal observations, reinforced by conversations with serving foreign ministry officials.*

- Kontrol dalam bahasa yang diperlukan untuk membentuk persepsi yang akan di tujukan kepada publik.
- Pentingnya publik domestik adalah bahwa pembicara dari kementerian luar negeri memiliki fokus terutama pada masalah-masalah luar negeri. Dengan cara yang sama, bahkan pada kunjungan ke luar negeri, para pemimpin jauh lebih tertarik pada apa yang dikatakan media massa, mengingat itu dapat menjangkau publik asing melalui media di negara-negara yang dikunjungi. Idealnya, satu hal harus dapat menyeimbangkan yang lain, dan kementerian luar negeri mempermudah pekerjaan mereka untuk memastikan bahwa yang dilakukan sebagai prioritas yang setara, yaitu untuk kebaikan publik dalam negerinya, dan juga luar negerinya.

2. *Country as Brand*

Belakangan ini banyak negara yang telah menggunakan *country as brand* yang mereka dapatkan dari dunia periklanan perusahaan yang di ciptakan untuk mengubah cara pandang dari masyarakat asing terhadap negaranya. Pendekatan ini termasuk dalam upaya membangun citra dan *re-branding*.⁵⁸

Dalam melihat keefektifan upaya branding tersebut, pertama kita dapat melihat pesan sederhana yang berfungsi sebagai contoh slogan. Contohnya pariwisata di Malaysia menggunakan slogan "Truly Asia" dan contoh lainnya di Indonesia adalah "Wonderful Indonesia".⁵⁹

⁵⁷ Kishan S. Rana "21st century ambassador: Plenipotentiary to chief executive" (UK: Oxford University Press, 2005) Chapter 5.

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

Simon Anholt, seorang ahli yang diakui tentang perbaikan citra melalui *branding* dan pembentukan negara dari indeks *branding* negara (NBI), menyatakan bahwa membandingkan suatu negara dengan brand adalah sebuah metafora, tidak lebih. Itu berkaitan dengan reputasi, dan memandu yang lain dan membuat perbedaan bagi keberhasilan bisnis, perdagangan, hubungan politik, dan dengan rakyatnya.⁶⁰ 90% persepsi telah dibuat dari generasi ke generasi, tetapi 10% sisanya berada di bawah kendali pemerintah. Sangat penting untuk mengukur dampak tindakan yang diambil untuk meningkatkan reputasi sebuah negara, yang juga merupakan upaya NBI. Banyak persepsi dibentuk dengan cara masyarakat di negara itu berurusan dengan masyarakat lainnya.⁶¹ Sehingga *re-branding* menjadi cara untuk memunculkan atau mempertahankan citra positif negara pembuat brand tersebut.

3. Pendekatan Alternatif (*An Alternative Approach*)

Pendekatan alternatif adalah kegiatan yang dilakukan diluar dari skema yang besar, namun memiliki strategi yang terencana dengan tujuan yang sangat jelas. Contoh dari *alternative approach* ini sendiri adalah:

- Membangun kinerja untuk promosi pariwisata, mobilisasi investasi, dan mendorong ekspor.
- Melakukan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya tidak terencana, namun kegiatan tersebut memiliki tujuan yang sangat jelas. Seperti

⁶⁰ Interview given by Simon Anholt, *The Mint*, New Delhi, September 5, 2009.

⁶¹ *Ibid*

mengadakan makan siang bersama diplomat, expo, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

- *Brand* dari produk yang mendunia juga termasuk di dalam pendekatan alternatif ini.⁶² Reputasi perusahaan yang membuatnya, berkontribusi banyak pada citra negara. Seperti contohnya Perancis yang dikenal dengan *brand-brand fashion*nya yang terkenal, dan begitu juga Jepang yang dikenal dengan produk-produk berkualitasnya yang berhasil mendefinisikan Jepang.



⁶² Joseph Frankel, *The Making of Foreign Policy* (Oxford University Press, London, 1963).

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana kualitatif menekankan pada persoalan kedalaman (kualitas) data bukannya banyaknya (kuantitas) data yang di dapat. Ia juga menyatakan, bahwa semua riset yang menggunakan paradigma kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data.

1.8.2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah upaya dari Indonesia dalam memperbaiki citranya melalui diplomasi publik paska kebijakan penenggelaman kapalnya yang telah menenggelamkan kapal Malaysia di laut Indonesia. Batasan waktu yang penulis gunakan untuk melihat upaya Indonesia ini adalah tahun dimana kebijakan penenggelaman kapal mulai di berlakukan, yaitu tahun 2014 hingga di pertengahan tahun 2017.

1.8.3. Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisa adalah unit yang nantinya akan di deskripsikan, dijelaskan, dan dijawabkan di dalam sebuah penelitian. Di dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah negara Indonesia, dan unit eksplanasinya adalah *image* Indonesia di mata Malaysia.

1.8.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, penulis mendapatkan sumber data dari sumber primer, atau sumber yang terjamin keabsahannya seperti berupa dokumen kebijakan. Kemudian berdasarkan dari sumber sekunder atau

data-data yang ditemukan berasal dari artikel, makalah, jurnal, majalah, surat kabar, *website*, dan lain-lain yang berkaitan dengan upaya Indonesia melalui diplomasi publik untuk mengembalikan citranya di mata publik Malaysia pasca adanya kebijakan penenggelaman kapal Malaysia di laut Indonesia.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data di dalam sebuah penelitian akan berhubungan dengan jumlah data yang telah di kumpulkan, dan kemudian menyajikan hasilnya. Di dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman, terdapat beberapa teknik yang dilakukan di dalam menganalisis data, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Merupakan langkah yang paling awal di dalam analisis data. Dimana setelah mengumpulkan data, data tersebut akan segera di olah. Data yang di kumpulkan berupa jurnal, majalah, surat kabar, dan informasi yang di peroleh dari *website* resmi pemerintah yang berkaitan dengan upaya diplomasi publik Indonesia ke Malaysia pasca adanya kebijakan penenggelaman kapal.

2. Reduksi Data

Pada tahap ini kita diminta untuk memilih data yang berkaitan dengan tema yang kita ambil di dalam sebuah penelitian, dan kemudian merangkumnya dan menjadikan data itu berisi hal-hal yang penting untuk penelitian kita. Pada tahap reduksi data, kita mulai mengarahkan dan membagi data-data yang di dapat berupa jurnal, majalah, surat kabar, dan data yang di dapat dari *website* resmi tentang diplomasi publik Indonesia ke Malaysia paska adanya kebijakan

penenggelaman kapal tersebut ke dalam beberapa pembagian, atau golongan, dan kemudian meninggalkan data-data yang tidak perlu, lalu menyimpulkan data-data tersebut.

3. Penyajian Data

Penyajian data disini memiliki arti untuk mengolah data yang belum sepenuhnya jadi dalam bentuk tulisan, namun sudah memiliki tema yang cukup jelas.

4. Kesimpulan

Kesimpulan adalah teknik yang paling terakhir di dalam analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.⁶³ Kesimpulan ini akan berfokus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang sebelumnya di ajukan oleh penulis.

Penulis juga akan menggunakan tiga komponen dari konsep diplomasi publik yang telah di paparkan sebelumnya, ketiga komponen tersebut adalah:

1. *News Management*, yaitu mempengaruhi publik melalui media. Adanya jaringan informasi global yang dapat menjadikan transmisi berita ke khalayak publik dari negara asing yang dituju menjadi lebih cepat.
2. *Country as Brand*, upaya ini termasuk dalam membangun citra setelah adanya konflik dengan negara lain. Ini juga sebagai upaya dari *re-branding*.
3. *An Alternative Approach*, merupakan sebuah upaya yang dilakukan diluar dari skema yang besar, namun memiliki strategi yang terencana dan tujuan yang jelas.

⁶³ Miles dan Huberman. "Analisis Data Kualitatif", dalam Fachrudin. *Teknik Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2013).

Ketiga komponen inilah yang akan penulis gunakan dalam menganalisis upaya diplomasi publik yang dilakukan Indonesia kepada Malaysia untuk mengembalikan citranya setelah adanya kebijakan penenggelaman kapal.

1.8.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan ini terdapat latar belakang dari masalah yang akan memperlihatkan fakta-fakta yang terdapat dari sebuah isu yang dipilih oleh penulis di penelitian ini. Kemudian diikuti dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konsep, dan metodologi penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, bagian pendahuluan ini menjelaskan segala gambaran mengenai penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

BAB II Kepentingan Indonesia dalam memiliki hubungan baik dengan Malaysia

Pada bagian ini akan di jelaskan mengenai dinamika hubungan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, dan juga kepentingan-kepentingan dari Indonesia dalam memiliki hubungan baik dengan Malaysia.

BAB III Kebijakan Penenggelaman Kapal Indonesia dan respon dari publik Malaysia

Dalam BAB ini akan dijelaskan tentang kebijakan penenggelaman

kapal yang dilakukan Indonesia dan respon yang didapat Indonesia setelah menenggelamkan kapal Malaysia di laut Indonesia.

BAB IV Upaya Diplomasi Publik Indonesia kepada Malaysia

Pada bagian BAB ini, penulis akan mendeskripsikan upaya diplomasi publik yang dilakukan Indonesia ke Malaysia, dan di lanjutkan dengan hasil yang di dapat dari upaya yang dilakukan oleh Indonesia tersebut.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan pada pertanyaan penelitian.

